



KR-Subcan Mustofa

Meski otoped semakin digemari wisatawan, namun pengguna (penyewa) harus tetap menghormati pejalan kaki sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

GANDENG KAUM MILENIAL, HIDUPKAN MESIN PARTAI PPP Kota Yogya Bertekad Raih Satu Fraksi

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Yogya bertekad untuk meraih satu fraksi di DPRD Kota Yogya pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Target tersebut menjadi pendorong jajaran pengurus yang baru dilantik pada Minggu (13/3) lalu.

Ketua DPC PPP Kota Yogya M Hasan Widagdo, menyebut untuk dapat mendirikan satu fraksi setidaknya dibutuhkan empat kursi. "Jumlah anggota fraksi itu minimal disesuaikan dengan jumlah komisi. Di Kota Yogya ada empat komisi sehingga minimal kami harus mampu meraih empat kursi pada Pileg 2024 besok," urainya, Senin (14/3).

Pelantikan pengurus DPC PPP Kota Yogya pada Minggu (13/3) lalu digelar di Pendopo Sego Jojo Kotagede oleh Ketua DPW PPP DIY HM Yazid SAg. Ketua dijabat M Hasan Widagdo, Sekretaris Mahendra dan Bendahara Andriyanto. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pengurus PAC se-Kota Yogya.

Hasan menambahkan pada Pileg 2019 lalu pihaknya meraih satu kur-

si di DPRD Kota Yogya. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras untuk mampu menambah minimal tiga kursi.

"Strategi yang akan kami bangun ialah dengan menggandeng kaum milenial serta menghidupkan mesin partai," tandasnya.

Strategi tersebut seiring dengan dijadikannya Kota Yogya sebagai percontohan pengembangan pengelolaan data dan digitalisasi oleh DPP PPP. Sehingga jajarannya saat ini sudah mulai fokus pada pengelolaan data yang melibatkan kaum milenial. Apalagi banyak generasi Islam milenial di Kota Yogya



KR-Istimewa

Pelantikan pengurus DPC PPP Kota Yogya oleh HM Yazid SAg.

yang selama ini belum terakomodir dari aspek kepentingan politik.

Di samping itu, badan otonom yang menjadi mesin partai juga sudah dikonsolidasikan. Terutama Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) serta Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). "Dalam waktu dekat kami juga akan mengukuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan. Eksistensinya sudah cukup lama namun perlu kami kukuhkan supaya legitimasinya semakin kuat," tandasnya. **(Dhi)-d**

SERING DITERTIBKAN PETUGAS JOGOBORO

Mengadu ke Dewan, Pengasong Minta Solusi

YOGYA (KR) - Puluhan pedagang asongan (pengasong) yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Asongan Malioboro, Senin (14/3) mengadu ke Gedung DPRD Kota Yogya. Mereka meminta ada solusi karena usai relokasi PKL 1 Februari 2022 lalu kerap ditertibkan petugas Jogoboro.

Ketua Komunitas Pedagang Asongan Malioboro Raden Ridwan Suryobintoro, mengaku sebelum ada relokasi PKL, aktivitas pengasong hampir tidak ada persoalan ketika menjajakan dagangan di Malioboro secara mobile. Sedangkan setelah adanya relokasi PKL, petugas Jogoboro gencar melakukan penertiban.

"Ketika kami ini dilarang di kawasan Malioboro, tapi kan tidak ada regulasinya. Katanya kami juga tidak ada legalitas tapi kenapa skuter yang juga tidak ada legalitasnya tetap bisa beroperasi di Malioboro. Kami butuh keadilan," katanya.

Menurutnya, para pengasong yang tergabung dalam komunitas sudah dibekali seragam ketika beraktivitas. Total anggota mencapai

181 orang dengan 12 unit usaha. Pihaknya juga sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya namun belum pernah ditanggapi.

Oleh karena itu, imbuh Ridwan, sembari menunggu solusi dari pihak yang berwenang pihaknya akan tetap berjualan secara asongan meski harus kucing-kucingan dengan petugas. Hal ini karena banyak anggotanya yang hanya bergantung dari aktivitas mengasong di kawasan Malioboro. "Kalau dari legalitas memang tidak ada, tapi keberadaan kami beriringan dengan adanya PKL. Selama ini tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara Ketua Pansus Penataan Malioboro DPRD Kota

Yogya Fokki Ardiyanto, mengaku di sela menerima audiensi Komunitas Pedagang Asongan Malioboro dirinya langsung melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogya Yetti Martanti. Hal ini karena relokasi PKL maupun penataan Malioboro berada di bawah Dinas Kebudayaan. Dari komunikasi tersebut dinyatakan jika sebelum ada relokasi, pengasong memang tidak diperbolehkan di kawasan Malioboro.

Meski demikian, imbuh Fokki, dirinya akan menjembatani solusi atas persoalan yang membelit para pengasong di Malioboro tersebut. Ia mencontohkan kasus serupa yang dialami para pendorong gerobak yang tidak masuk dalam penataan namun ikut terdampak.

"Mereka (pendorong gerobak) diusulkan alih profesi sebagai tenaga kebersihan. Tetapi masalahnya kan ada pada anggaran yang harus dibahas. Dan sejak awal sebelum relokasi mereka juga melakukan komunikasi," terangnya. **(Dhi)-d**

TINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA

Hapus PCR, Tegakkan Disiplin Prokes

YOGYA (KR) - Kebijakan pemerintah untuk menghapuskan tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik atau dalam negeri, menjadi angin segar bagi sektor wisata. Karena dengan kebijakan tersebut diprediksikan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata akan mengalami kenaikan. Pelaku pariwisata menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghapus tes PCR dan antigen bagi perjalanan domestik.

"Kebijakan ini menjadi angin segar dan kabar yang ditunggu tunggu oleh pelaku pariwisata. Dampak dari kebijakan itu diharapkan industri pariwisata akan lebih menggeliat dan mampu menaikkan minat wisatawan ke DIY. Karena pemberlakuan PCR dan antigen yang menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan selama 2 tahun terakhir ini telah

memberatkan wisatawan. Pasalnya hal itu berdampak pada peningkatan alokasi biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan selama kunjungan," kata pengamat pariwisata dari Akademi Stipary Yogyakarta, Suharto MPar di Yogyakarta, Minggu (13/3).

Menurut Suharto, kendati demikian prediksi perjalanan wisata baru akan terlihat meningkat secara signifikan setelah momen Lebaran nanti. Jadi saat ini yang terpenting dan perlu dilakukan dengan adanya penghapusan tes PCR dan antigen.

Penegakkan Prokes di destinasi wisata wajib diperketat, tidak boleh ada yang kendur dan abai. Begitu pula dengan infrastruktur dan Sarpras prokes di setiap destinasi harus terus dievaluasi dan ditingkatkan.

"Setiap destinasi wajib menerapkan aplikasi peduli lindungi de-

ngan ketat tidak boleh hanya sekadar formalitas. Hal itu untuk memastikan bahwa masyarakat sudah divaksinasi dosis lengkap. Sehingga semua wisatawan telah memiliki kekebalan imunitas," ungkapnya.

Lebih lanjut Suharto menambahkan, selain beberapa hal di atas, semua pelaku wisata di DIY harus mampu bersinergi untuk menciptakan dan meyakinkan bahwa Yogyakarta sebagai daerah yang aman dikunjungi wisatawan. Mengingat sebentar lagi akan memasuki momen Lebaran diharapkan semua pihak harus mampu mengantisipasi dengan baik. Di antaranya dengan meningkatkan kedisiplinan terhadap Prokes. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus yang akhirnya kebijakan penghapusan tes PCR dan antigen oleh pemerintah hanya akan sia-sia. **(Ria)-d**

HARYANI KETUA DPW HIMPONI 2022-2027

Pengurus Harus Jadi Role Model bagi Anggota

YOGYA (KR) - Keberadaan Himpanan Perawat Onkologi (HimpONI) yang berada di bawah naungan Persatuan Perawat Nasioanal Indonesia (PPNI) menyatukan para perawat ataupun pengajar di bidang onkologi diseluruh Indonesia. Karena perawat onkologi meyakini perlu suatu wadah bagi perjuangan profesi keperawatan khususnya bidang keperawatan onkologi.

Semua itu untuk mendukung tercapainya peningkatan sumber daya manusia dan berdampak meningkatkan pelayanan keperawatan kepada pasien kanker yang berkualitas.

Demikian disampaikan Panitia Muswil HimpONI DIY Sukwan sukomo SKep Ns, Senin (14/3) pada muswil HimpONI yang diselenggarakan secara virtual. Muswil digelar bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan

DPW HimpONI DIY Periode 2015-2021. Muswil tersebut dihadiri oleh Ketua DPW Persatuan Perawat Nasioanal Indonesia (PPNI) DIY Tri Prabowo SKp MSc.

"Karena masih dalam suasana pandemi dan kasus harian yang masih fluktuatif, kami sepakat Muswil dilaksanakan secara virtual," kata Sukwan Sukomo.

Sedangkan ketua DPW HimpONI DIY Periode 2015-2021 Dr Christatntie Effendi MKes mengatakan, menjadi pengurus HimpONI tidak hanya butuh kemampuan sesuai bidang keilmuannya saja (bidang onkologi). Tetapi harus bisa menjadi pengayom, penengah, role model pada anggota. Serta memotivasi anggota untuk belajar menjadi pemimpin dalam suatu kegiatan.

Ketua DPW PPNI DIY Tri Prabowo SKp MSc menyampaikan, him-

punan perawat adalah nadinya PPNI bukan kompetitor. PPNI tidak mungkin mengcover semua tuntutan anggota, jadi himpunan salah satu kepanjangan tangan PPNI untuk memenuhi kebutuhan anggota. Misal dalam hal menjaga kompetensi sesuai bidang, melakukan kegiatan ilmiah lain.

Dalam Muswil tersebut disepakati Haryani SKp MKes PhD sebagai Ketua DPW HimpONI DIY periode 2022-2027. Sebagai ketua terpilih Haryani akan berusaha membawa HimpONI DIY sebagai himpunan yang inovatif, tanggap dan berkomitmen. Serta mengabdikan sesuai kepentingan masyarakat melalui sinergitas kegiatan pendidikan-pelatihan, pelayanan dan penelitian di bidang onkologi sepanjang rentang perawatan kanker serta tata kelola organisasi yang baik. **(Ria)-d**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Dewan Dorong Perbanyak Wifi Publik

YOGYA (KR) - Kondisi pandemi Covid-19 yang telah dirasakan sejak tahun 2020 mampu mengubah tatanan di masyarakat. Di antaranya sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring serta pemasaran digital yang meningkat tajam. Untuk itu dewan pun mendorong eksekutif untuk terjun ke wilayah dengan memperbanyak pemasangan jaringan wifi untuk publik.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Yustinus Kelik Mulyono, menyebut jaringan internet kini menjadi kebutuhan masyarakat. "Pada masa pandemi ini jangan sampai ada warga yang kesulitan mengakses internet. Sehingga kami mendorong agar wifi untuk masyarakat ini semakin diperbanyak," katanya.

Saat ini sasaran wifi publik masih sebatas tiap RW. Kelik pun berharap sarasannya bisa diperluas hingga tiap RT. Hal ini karena keberadaan wifi terbukti mampu menunjang aktivitas masyarakat selama masa pandemi.

Dicontohkannya saat aktivitas pembelajaran kem-

Yustinus Kelik Mulyono Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

bali diberlakukan secara daring, orangtua siswa harus mengalokasikan kuota untuk internet. Tetapi jika di wilayahnya terdapat wifi publik, maka beban masyarakat bisa berkurang. Begitu pula bagi pelaku usaha yang kini dituntut memahami digital marketing, wifi publik pun bisa menopang pengembangan usahanya. "Semakin banyak wifi publik di wilayah maka akan semakin mudah masyarakat mengakses internet. Ini bisa menjadi bukti kehadiran pemerintah tatkala pandemi tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir," urainya.

Menurut Kelik, memperbanyak wifi publik tidak semata identik dengan anggaran negara yang harus ditambah. Akan tetapi Pemkot dapat melibatkan perusahaan atau swasta dengan mengulirkan tanggung jawab sosial atau CSR. Apalagi perusahaan jasa telekomunikasi yang beroperasi di Kota Yogya juga tidak sedikit. "Untuk kepentingan masyarakat, segala upaya harus dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan. Pihak ketiga sangat mungkin untuk dilibatkan," tandasnya. **(Dhi)-d**